

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM PENILAIAN KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2011-2016)**

Ibnu Rusdi¹⁾, Nur Azlina²⁾, Sem Paulus²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : Ibnursdi180293@gmail.com

*Analysis Of Financial Ratio In Assessment Of Financial Performance Local
Government
(Case Study on the Regional Government of Rokan Hilir Regency
Fiscal Year 2011-2016)*

ABSTRACT

This study aims to examine the analysis of financial performance in terms of regional independence ratios, regional income efficiency ratios, regional income effectiveness ratios, regional expenditure efficiency ratios and economic ratios of regional spending. The population of this study is budget realization report of revenue and expenditure regional in Rokan Hilir Regency from 2011-2016. This research method uses total sampling, which is a sample that represents the population because it is considered small or less than one hundred. The method of analysis was carried out using descriptive analysis based on case studies. The results of the tests that have been carried out. The total average regional independence ratio is 4,52%, which is included in the very low category. The total average efficiency ratio of regional income is 102.63% which is included in the inefficient category. The total average ratio of the effectiveness of regional income is 81.95%, which is included in the category quite effective. The total average regional expenditure efficiency ratio is 66,63% which is included in the efficient category. The total average ratio of regional expenditure effectiveness is 71.46%, which is included in the category of ineffective. The total average economic ratio of regional expenditure is 71.46%, which is included in the economic category.

Keyword : regional independence ratios, regional income efficiency ratios, regional income effectiveness ratios, regional expenditure efficiency ratios and economic ratios of regional spending and financial performance.

PENDAHULUAN

Penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam menggali, mengelola dan

memanfaatkan sumber-sumber keuangan asli daerahnya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung

sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta dapat mempunyai kebebasan penuh dalam menggunakan dan memanfaatkan dana-dana bagi kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahmawati dan Putra, 2016). Salah satu cara untuk menilai atau menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan pengelolaan kinerja keuangan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan catatan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil pengelolaan laporan keuangannya. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah terdapat beberapa permasalahan berupa tingkat pertumbuhan dan pencapaian pendapatan daerah dan belanja daerah yang belum maksimal.

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu Rampengan, dkk. (2016) melakukan penelitian tentang analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Hasil penelitian menyatakan Tingkat atau kriteria efektifitas anggaran belanja pada BAPPEDA Kota Manado dari tahun 2011-2015 bervariasi. Dimana pada tahun 2015 dan 2014 masuk dalam kriteria tingkat yang cukup efektif, dan pada tahun 2011, 2012, 2013 masuk dalam kriteria yang kurang efektif. Dalam pelaksanaan anggaran belanja tahun 2011-2015 secara

keseluruhan sudah diolah secara efisien. South, dkk. (2016) meneliti tentang pengukuran efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset (DPKA) Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menyatakan rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 rata-rata diatas 100%. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah pada DPKA Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif. Sedangkan secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang efisien. Rahmawati dan Putra (2016) meneliti tentang analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali, tingkat efektifitas tergolong kurang baik dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, tingkat efisiensi keuangan daerah tergolong tidak efisien, tingkat pertumbuhan PAD serta Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung menunjukkan pertumbuhan yang positif, tingkat proporsi pendapatan paling besar berasal dari dana perimbangan dan pengeluaran terbesar berasal dari belanja tidak langsung, dan tingkat ekonomi belanja daerah tergolong ekonomi.

Bagaimanakah analisis kinerja keuangan ditinjau dari rasio kemandirian daerah, rasio efisiensi pendapatan daerah, rasio efektivitas pendapatan daerah, rasio efisiensi belanja daerah, rasio efektivitas belanja daerah dan rasio ekonomi

belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2011-2016.

Untuk menguji analisis kinerja keuangan ditinjau dari rasio kemandirian daerah, rasio efisiensi pendapatan daerah, rasio efektivitas pendapatan daerah, rasio efisiensi belanja daerah, rasio efektivitas belanja daerah dan rasio ekonomi belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2011-2016.

TELAAH PUSTAKA

Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap perundang-undangan (Fidelius, 2013). PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan laporan keuangan pemerintah terdiri dari: 1)Laporan Realisasi Anggaran; 2)Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 3)Laporan Operasional; 4)Neraca; 5)Laporan Arus Kas; 6)Laporan Perubahan Ekuitas; 7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Nordiawan dan Ayuningtyas (2010:125) menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship)
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and retrospective reporting)
3. Perencanaan dan informasi otorisasi (planning and authorization information)
4. Kelangsungan organisasi (viability)
5. Hubungan masyarakat (public relation)
6. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figure)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-undang nomor 15 Tahun 2013 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD.

Pendapatan Daerah

pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hal daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat.

Belanja Daerah

Menurut Nurlan Darise (2008:50) belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja Daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu: a)Belanja Aparatur Daerah; b)Belanja Pelayanan Publik; c)Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Penilaian Kinerja Keuangan

Penilaian kinerja keuangan merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun proses (Larry D. Stout dalam Bastian, 2001:329). Artinya bahwa setiap kegiatan organisasi merupakan suatu proses yang tercatat dalam misi dan sejalan dengan tujuan organisasi, dimana kegiatan tersebut dikatakan sukses apabila hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Penilaian kinerja merupakan suatu alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (James B. Whittaker dalam Bastian, 2001:121).

Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan (Nogi, 2003:108). Secara umum, tujuan penilaian kinerja adalah: 1)Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik; 2)Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya; 3)Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Pada dasarnya penilaian kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu: a)Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah; b)Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan; c)Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Konsep Penilaian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Rondowunu, dkk. (2015) kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Salah satu alat ukur untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis 1)Rasio

Kemandirian Daerah; 2) Rasio Efisiensi; 3) Rasio Efektivitas; 4) Rasio Ekonomi.

Konsep Kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintahannya termasuk pengembangan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat luas, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah pendapatan daerah termasuk bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Rahmawati dan Putra, 2016).

Konsep Efisiensi Pendapatan Daerah

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Atau dengan kata lain efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Indra Bastian, 2010: 77).

Konsep Efektivitas Pendapatan Daerah

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan (Indra Bastian, 2010: 77).

Konsep Efisiensi Belanja Daerah

Mardiasmo (2009:132) efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well).

Konsep Efektivitas Belanja Daerah

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).

Konsep Ekonomi Belanja Daerah

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan input dimana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan pada harga terbaik yang dimungkinkan. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Indra Bastian 2010: 77).

Penelitian Terdahulu

Rahmawati dan Putra (2016) meneliti tentang analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-

2012. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali, tingkat efektifitas tergolong kurang baik dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, tingkat efisiensi keuangan daerah tergolong tidak efisien, tingkat pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif, tingkat proporsi pendapatan paling besar berasal dari dana perimbangan dan pengeluaran terbesar berasal dari belanja tidak langsung, dan tingkat belanja tergolong ekonomi.

Rampengan, dkk. (2016) melakukan penelitian tentang analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Hasil penelitian menyatakan Tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada BAPPEDA Kota Manado dari tahun 2011-2015 bervariasi. Dimana pada tahun 2015 dan 2014 masuk dalam kriteria tingkat yang cukup efektif, dan pada tahun 2011, 2012, 2013 masuk dalam kriteria yang kurang efektif. Dalam pelaksanaan anggaran belanja tahun 2011-2015 secara keseluruhan sudah diolah secara efisien.

South, dkk. (2016) meneliti tentang pengukuran efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset (DPKA) Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menyatakan rata-rata tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 rata-rata diatas 100%. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA

Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif. Sedangkan secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang efisien.

Kerangka Pemikiran

Penilaian atau pengukuran kinerja digunakan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi. Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tidak hanya berdasarkan pada ukuran finansial saja tetapi juga pada ukuran non-finansial, karena tujuan utama organisasi ini bukan memperoleh laba melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja organisasi sektor publik yang bersifat multidimensional menyebabkan tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja. Selain itu, output yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik umumnya bersifat intangible, sehingga perlu adanya ukuran non-finansial yang dapat mencerminkan besarnya output yang dihasilkan. Ukuran tersebut dapat dilakukan dengan Rasio kemandirian daerah, rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio ekonomi yang merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir periode 2011-2016. Penentuan sampel penelitian ini dengan menggunakan total sampling (sampling jenuh),

yaitu sampel yang mewakili jumlah populasi karena dianggap kecil atau kurang dari seratus.

Jenis Penelitian dan Sumber Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Rondowunu (2015) jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu situasi, keadaan atau bidang kajian yang menjadi obyek penelitian. Hasil deskriptif dapat bersifat kuantitatif menggunakan angka-angka maupun kualitatif (kalimat verbal) atau keduanya. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka-angka dalam laporan APBD dan RAPBD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2011-2016.

Tehnik Pengumpulan Data

. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Untuk memperoleh data tersebut peneliti menggunakan data sekunder, dimana data diperoleh dari sumber dokumentasi.

Definisi Operasional Variabel dan Variabel Penelitian

Penilaian Kinerja Keuangan Daerah

Penilaian kinerja keuangan merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun proses (Larry D. Stout dalam Bastian, 2001:329).

Rasio Kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintahannya termasuk pengembangan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat luas.

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD/Realisasi Total Pendapatan Daerah}}{100\%}$$

Kriteria tingkat Kemandirian daerah menurut Halim (2007:232) adalah sebagai berikut:

- 1) Jika hasil perbandingan 0%-25%, maka kemandirian daerah dikatakan rendah sangat rendah.
- 2) Jika hasil perbandingan 25%-50%, maka kemandirian daerah dikatakan rendah.
- 3) Jika hasil perbandingan 50%-75%, maka kemandirian daerah dikatakan sedang.
- 4) Jika hasil perbandingan 75%-100%, maka kemandirian daerah dikatakan tinggi.

Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah

Efisiensi dapat diukur dengan rasio-rasio antara output/keluaran dan input/masukan sekunder.

$$\text{Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Pengeluaran Rutin}}{\text{Total Penerimaan}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi pendapatan daerah sebagai berikut:

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan daerah dikatakan tidak efisien.

- 2) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka pendapatan daerah dikatakan kurang efisien.
- 3) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka pendapatan daerah dikatakan cukup efisien.
- 4) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka pendapatan daerah dikatakan efisien.
- 5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka pendapatan daerah dikatakan sangat efisien

Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan pendapatan daerah.

Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah = Realisasi Penerimaan / Target Penerimaan yang Ditetapkan x 100%

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas pendapatan daerah sebagai berikut:

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan daerah dikatakan sangat efektif.
- 2) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka pendapatan daerah dikatakan efektif.
- 3) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka pendapatan daerah dikatakan cukup efektif.
- 4) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka pendapatan daerah dikatakan kurang efektif.
- 5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka pendapatan daerah dikatakan tidak efektif.

Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Tingkat efisiensi anggaran belanja dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

Rasio Efisiensi Belanja Daerah = Realisasi Anggaran Belanja Langsung / Realisasi Anggaran Belanja x 100%

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- 2) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
- 3) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- 4) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- 5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Rasio Efektivitas Belanja Daerah

Tingkat efektifitas anggaran belanja diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

Rasio Efektivitas Belanja Daerah = Realisasi Anggaran Belanja / Target Anggaran Belanja x 100%

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut:

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
- 2) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
- 3) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
- 4) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
- 5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Rasio Ekonomi Belanja Daerah

Menurut Mardiasmo, (2009:36) rasio ekonomi merupakan rasio yang membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan juga memenuhi berbagai keperluan yang dibutuhkan dalam satu periode anggaran.

Rasio Ekonomi Belanja Daerah = Realisasi Belanja / Anggaran Belanja x 100%

Tingkat klasifikasi menurut Mardiasmo (2009:38) dalam Erna dan Putra (2016) tentang kriteria penilai kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak ekonomis.
- 2) Jika hasil perbandingan sama dengan 100%, maka anggaran belanja dikatakan ekonomis berimbang.
- 3) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan ekonomis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rokan Hilir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera antara 1014' - 2030' LU dan 100016' - 101021' BT. Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara : Propinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka.
- b) Sebelah selatan : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu.
- c) Sebelah Timur : Kota Dumai.
- d) Sebelah Barat : Propinsi Sumatera Utara.

Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 1
Rasio Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2011-2016 (Dalam Ribu Rupiah)

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian Daerah	Keterangan
2011	63.099.426	1.675.757.998	3,77%	Sangat rendah
2012	66.423.363	1.914.089.670	3,47%	Sangat rendah
2013	82.962.459	1.955.182.048	4,24%	Sangat rendah
2014	86.143.189	2.392.184.637	3,60%	Sangat rendah
2015	111.332.070	1.638.887.669	6,79%	Sangat rendah
2016	94.904.410	1.601.526.533	5,93%	Sangat rendah

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2016 (data diolah)

Rasio kemandirian daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Berikut hasil penjelasannya:

- Tahun 2011 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 63.099.426.000,- dan realisasi total pendapatan daerah Rp

1.675.757.998.000,-. Sehingga rasio kemandirian daerah adalah 3,77% tergolong sangat rendah.

- Tahun 2012 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 66.423.363.000,- dan realisasi total pendapatan daerah Rp 1.914.089.670.000,-. Sehingga rasio kemandirian daerah adalah 3,47% tergolong sangat rendah.
- Tahun 2013 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 82.962.459.000,- dan realisasi total pendapatan daerah Rp 1.955.182.048.000,-. Sehingga rasio kemandirian daerah adalah 4,24% tergolong sangat rendah.
- Tahun 2014 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 86.143.190.000,- dan realisasi total pendapatan daerah Rp 2.392.184.637.000,-. Sehingga rasio kemandirian daerah adalah 3,60% tergolong sangat rendah.
- Tahun 2015 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 111.332.070.000,- dan realisasi total pendapatan daerah Rp 1.638.887.669.000,-. Sehingga rasio kemandirian daerah adalah 6,79% tergolong sangat rendah.
- Tahun 2016 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 94.904.410.000,- dan realisasi total pendapatan daerah Rp 1.601.526.533.000,-. Sehingga rasio kemandirian daerah adalah 5,93% tergolong sangat rendah.

Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah

Tabel 2
Rasio Efisiensi Pendapatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2011-2016

(Dalam Ribu Rupiah)

Tahun	Realisasi Total Pengeluaran Daerah	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah	Keterangan
2011	1.627.887.193	1.675.757.998	97,14%	Kurang Efisien
2012	1.965.598.233	1.914.089.670	102,69%	Tidak efisien
2013	2.281.575.838	1.955.182.048	116,69%	Tidak efisien
2014	1.821.224.190	2.392.184.637	76,13%	Efisien
2015	2.128.433.393	1.638.887.669	129,87%	Tidak efisien
2016	1.647.388.588	1.601.526.533	102,86%	Tidak efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2016 (data diolah)

Rasio efisiensi pendapatan pada Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Berikut hasil penjelasannya:

- Tahun 2011 realisasi total pengeluaran daerah Rp. 1.627.887.193.000,- dan realisasi total pendapatan daerah Rp 1.627.887.193.000,-. Sehingga rasio efisiensi pendapatan daerah adalah 97,14% tergolong kurang efisien.
- Tahun 2012 realisasi total pengeluaran daerah Rp. 1.965.598.233.000,- dan realisasi total pendapatan daerah Rp 1.914.089.670.000,-. Sehingga rasio efisiensi pendapatan daerah adalah 102,69% tergolong tidak efisien.
- Tahun 2013 realisasi total pengeluaran daerah Rp. 2.281.575.838.000,- dan realisasi total pendapatan daerah Rp 1.955.182.048.000,-. Sehingga rasio efisiensi pendapatan daerah adalah 116,69% tergolong tidak efisien.
- Tahun 2014 realisasi total pengeluaran daerah Rp. 1.821.224.190.000,- dan realisasi total pendapatan daerah Rp 2.392.184.637.000,-. Sehingga

rasio efisiensi pendapatan daerah adalah 76,13% tergolong efisien.

- Tahun 2015 realisasi total pengeluaran daerah Rp. 2.128.433.393.000,- dan realisasi total pendapatan daerah Rp 1.638.887.669.000,-. Sehingga rasio efisiensi pendapatan daerah adalah 129,87% tergolong tidak efisien.
- Tahun 2016 realisasi total pengeluaran daerah Rp. 1.647.388.588.000,- dan realisasi total pendapatan daerah Rp 1.601.526.533.000,-. Sehingga rasio efisiensi pendapatan daerah adalah 102,86% tergolong tidak efisien.

Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah

Tabel 3
Rasio Efektivitas Pendapatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2011-2016 (Dalam Ribu Rupiah)

Tahun	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Anggaran Total Pendapatan Daerah	Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah	Keterangan
2011	1.675.757.998	1.977.818.653	84,73%	Cukup Efektif
2012	1.914.089.670	2.045.236.980	93,59%	Efektif
2013	1.955.182.048	2.408.086.310	81,19%	Cukup Efektif
2014	2.392.184.637	2.528.259.455	94,62%	Efektif
2015	1.638.887.669	2.068.798.519	79,22%	Kurang Efektif
2016	1.601.526.533	2.612.062.614	61,31%	Kurang Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2016 (data diolah)

Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Tabel 4
Rasio Efisiensi Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2011-2016

(Dalam Ribu Rupiah)

Tahun	Realisasi Total Belanja Langsung	Realisasi Total Belanja Daerah	Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah	Keterangan
2011	1.092.021.194	1.627.887.193	67,08%	Efisien
2012	1.416.924.896	1.965.598.233	72,09%	Efisien
2013	1.698.955.200	2.281.575.838	74,46%	Efisien
2014	1.178.746.620	1.821.224.190	65%	Efisien
2015	1.254.843.990	2.128.433.393	59%	Sangat Efisien
2016	1.002.578.370	1.647.388.588	61%	Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2016 (data diolah)

Rasio efisiensi Belanja pada Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Berikut hasil penjelasannya:

- Tahun 2011 realisasi total belanja langsung Rp. 1.092.021.194.000,- dan realisasi total belanja daerah Rp 1.627.887.193.000,-. Sehingga rasio efisiensi belanja daerah adalah 67,08% tergolong efisien.
- Tahun 2012 realisasi total belanja langsung Rp. 1.416.924.896.000,- dan realisasi total belanja daerah Rp 1.965.598.233.000,-. Sehingga rasio efisiensi belanja daerah adalah 72,09% tergolong efisien.
- Tahun 2013 realisasi total belanja langsung Rp. 1.698.955.200.000,- dan realisasi total belanja daerah Rp 2.281.575.838.000,-. Sehingga rasio efisiensi belanja daerah adalah 74,46% tergolong efisien.
- Tahun 2014 realisasi total belanja langsung Rp. 1.178.746.620.000,- dan realisasi total belanja daerah Rp 1.821.224.190.000,-. Sehingga rasio efisiensi belanja daerah adalah 64,72% tergolong efisien.
- Tahun 2015 realisasi total belanja langsung Rp. 1.254.843.990.000,- dan realisasi total belanja daerah Rp 2.128.433.393.000,-. Sehingga

rasio efisiensi belanja daerah adalah 58,96% tergolong sangat efisien.

- Tahun 2016 realisasi total belanja langsung Rp. 1.002.578.370.000,- dan realisasi total belanja daerah Rp 1.647.388.588.000,-. Sehingga rasio efisiensi belanja daerah adalah 60,86% tergolong sangat efisien.

Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rasio Efektivitas Belanja Daerah

Tabel 5
Rasio Efektivitas Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2011-2016 (Dalam Ribu Rupiah)

Tahun	Realisasi Total Belanja Daerah	Anggaran Total Belanja Daerah	Rasio Efektivitas Belanja Daerah	Keterangan
2011	1.627.887.193	2.255.541.597	72,17%	Kurang efektif
2012	1.965.598.233	2.600.118.103	76,60%	Kurang efektif
2013	2.281.575.838	2.910.059.991	78,40%	Kurang efektif
2014	1.821.224.190	2.703.339.346	67,37%	Kurang efektif
2015	2.128.433.393	2.793.538.647	76,19%	Kurang efektif
2016	1.647.388.588	2.791.206.941	59,02%	Tidak Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2016 (data diolah)

Rasio efektivitas Belanja pada Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Berikut hasil penjelasannya:

- Tahun 2011 realisasi total belanja daerah Rp 1.627.887.193.000,- dan anggaran total belanja daerah Rp 2.255.541.597.000,-. Sehingga rasio efektivitas belanja daerah adalah 72,17% tergolong kurang efektif.
- Tahun 2012 realisasi total belanja daerah Rp 1.965.598.233.000,- dan anggaran total belanja daerah

Rp 2.600.118.103.000,-. Sehingga rasio efektivitas belanja daerah adalah 76,60% tergolong kurang efektif.

- Tahun 2013 realisasi total belanja daerah Rp 2.281.575.838.000,- dan anggaran total belanja daerah Rp 2.910.059.991.000,-. Sehingga rasio efektivitas belanja daerah adalah 78,40% tergolong kurang efektif.
- Tahun 2014 realisasi total belanja daerah Rp 1.821.224.190.000,- dan anggaran total belanja daerah Rp 2.703.339.346.000,-. Sehingga rasio efektivitas belanja daerah adalah 67,37% tergolong kurang efektif.
- Tahun 2015 realisasi total belanja daerah Rp 2.128.433.393.000,- dan anggaran total belanja daerah Rp 2.793.538.647.000,-. Sehingga rasio efektivitas belanja daerah adalah 76,19% tergolong kurang efektif.
- Tahun 2016 realisasi total belanja daerah Rp 1.647.388.588.000,- dan anggaran total belanja daerah Rp 2.791.206.941.000,-. Sehingga rasio efektivitas belanja daerah adalah 59,02% tergolong tidak efektif.

Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rasio Ekonomi Belanja Daerah

Tabel 6
Rasio Ekonomi Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2011-2016 (Dalam Ribu Rupiah)

Tahun	Realisasi Total Belanja Daerah	Anggaran Total Belanja Daerah	Rasio Ekonomis Belanja Daerah	Keterangan
2011	1.627.887.193	2.255.541.597	72,17%	Ekonomis
2012	1.965.598.233	2.600.118.103	76,60%	Ekonomis
2013	2.281.575.838	2.910.059.991	78,40%	Ekonomis
2014	1.821.224.190	2.703.339.346	67,37%	Ekonomis

	.190	.346		
2015	2.128.433.393	2.793.538.647	76,19%	Ekonomis
2016	1.647.388.588	2.791.206.941	59,02%	Ekonomis

Sumber: *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2016 (data diolah)*

Rasio ekonomi Belanja pada Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Berikut hasil penjelasannya:

- Tahun 2011 realisasi total belanja daerah Rp 1.627.887.193.000,- dan anggaran total belanja daerah Rp 2.255.541.597.000,-. Sehingga rasio ekonomis belanja daerah adalah 72,17% tergolong ekonomis.
- Tahun 2012 realisasi total belanja daerah Rp 1.965.598.233.000,- dan anggaran total belanja daerah Rp 2.600.118.103.000,-. Sehingga rasio ekonomis belanja daerah adalah 76,60% tergolong ekonomis.
- Tahun 2013 realisasi total belanja daerah Rp 2.281.575.838.000,- dan anggaran total belanja daerah Rp 2.910.059.991.000,-. Sehingga rasio ekonomis belanja daerah adalah 78,40% tergolong ekonomis.
- Tahun 2014 realisasi total belanja daerah Rp 1.821.224.190.000,- dan anggaran total belanja daerah Rp 2.703.339.346.000,-. Sehingga rasio ekonomis belanja daerah adalah 67,37% tergolong ekonomis.
- Tahun 2015 realisasi total belanja daerah Rp 2.128.433.393.000,- dan anggaran total belanja daerah Rp 2.793.538.647.000,-. Sehingga rasio ekonomis belanja daerah

adalah 76,19% tergolong kurang ekonomis.

- Tahun 2016 realisasi total belanja daerah Rp 1.647.388.588.000,- dan anggaran total belanja daerah Rp 2.791.206.941.000,-. Sehingga rasio ekonomis belanja daerah adalah 59,02% tergolong ekonomis.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan rasio kemandirian masih sangat rendah yaitu 4,52%, rasio efisiensi pendapatan memiliki hasil tidak efisien yaitu 102,63%, rasio efektivitas pendapatan memiliki hasil tidak efektif yaitu 81,95%, rasio efisiensi belanja memiliki hasil efisien yaitu 66,63%, Rasio efektifitas belanja memiliki hasil kurang efektif yaitu 71,46% dan rasio ekonomi belanja memiliki hasil ekonomis yaitu 71,46%.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya pada Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini hanya menggunakan rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio ekonomi.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan sampel pada daerah lain dan dapat juga menambah rasio pengukuran lainnya terhadap kinerja keuangan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra dan Gatot S, 2001, *Sistem Akuntansi Sektor Publik- Konsep untuk Pemerintah Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian indra. 2010. *Akuntansi sektor publik suatu pengantar* edisi tiga. Erlangga. Jakarta
- Fidelius. 2013. *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado*. JurnalEMBA.Vol. 1 No.4 ISSN 2303-1174.
- Kementerian Dalam Negeri. 1996. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akutansi Sektor Publik* Cetakan Pertama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Nordiawan Deddy, Hertianti Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Nogi, Hessel. 2003. *Manajemen Modern untuk Sektor Publik*. Balairung dan CO Yogyakarta. Yogyakarta.
- Nurlan Darise. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Indeks. Jakarta
- Rahmawati Erna Ketut Ni Dan Putra Wayan I. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012*. Jurnal ISSN 2302-8556.
- Rampengan Melania, Nangoi B. Grace, Manossoh Hendrik. 2016. *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado 2011-2015*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16.
- Rondonuwu, Ritno, Tinangon Jantje J, Dan Budiarmo Novi. 2015. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa 2010-2014*. Jurnal ISSN 23031174.
- Suoth Novelya, Tinangon Jantje, Dan Rondonuwu Sintje. 2016. *Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan 2011-2014*. Jurnal ISSN 2303-1174.